

RENCANA AKSI

DINAS KB, PP DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2026

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Visi : Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat						
1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian penduduk, keluarga berkualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta layanan publik yang inklusif.	Usia harapan hidup				
1.1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate				
1.1.1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)				
1.1.1.1	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah akseptor MKJP yang dilayani				
1.1.1.1.1	PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
	a. Melaksanakan pelayanan KB MKJP	Jumlah Akseptor KB MKJP Yang dilayani	626	846	483	356
1.1.1.1.2	PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
	a. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi Ke Fasilitas pelayanan Kesehatan serta monitoring dan evaluasi pendistribusial Alokon	Jumlah Faskes yang mendapatkan distribusi Alokon	14	14	14	14
1.1.1.2	PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi				
1.1.1.2.1	PENGLOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				
	a. Melaksakan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan di Balai Penyuluhan KB	Jumlah Fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing Balai Penyuluhan KB	0	1	1	0

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.1.1.2.2	PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				
	a. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pencegahan Stunting bagi Tenaga Lini Lapangan	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pencegahan Stunting di 18 Kecamatan	36	54	54	36
1.1.1.3	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yg telah Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				
1.1.1.3.1	PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				
	a. Melaksanakan Fasilitasi Kegiatan KIE oleh Kader IMP dan Sub IMP	Jumlah Kader Yang terfasilitasi Penggerakan kader IMP	356	356	356	356
1.1.1.4	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas mandiri				
1.1.1.4.1	FASILITASI PENGELOLAAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	Jumlah DASHAT di Kampung KB				
	a. Melaksanakan kegiatan penguatan/ pembinaan DASHAT Di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan di Kampung KB	0	1	1	0
1.1.2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase pelayanan KB yang dibiayai oleh JKN PBI				
1.1.2.1	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah akseptor MKJP yang dilayani				
1.1.2.1.1	PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
	a. Melaksanakan pelayanan KB MKJP bagi peserta JKN PBI	Jumlah Akseptor KB MKJP Yang dibiayai melalui JKN PBI	131	178	101	75
1.1.3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program				
1.1.3.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				
1.1.3.1.1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	a. Melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Forum OPD	Jumlah kegiatan FKP dan Forum OPD yang dilaksanakan	2	0	0	0

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.1.3.1.2	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	a. Membuat laporan realisasi keuangan dan realisasi fisik setiap bulan	Jumlah laporan realisasi keuangan dan realisasi fisik setiap bulan	3	3	3	3
1.1.3.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah bulan gaji dan Tambahan Penghasilan PNS yang terbayar				
1.1.3.2.1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
	a. Membayar gaji dan tunjangan ASN setiap bulan	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulan	37	37	37	37
1.1.3.3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah komponen instansi listrik dan peralatan serta perlengkapan kantor / rumah tangga yang terpenuhi				
1.1.3.3.1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				
	a. Menyediakan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor berupa baterai dan alat-alat elektrikal (Lampu, kabel roll, stop kontak)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	0	2	0	0
1.1.3.3.2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
	a. Melakukan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti alat pendingin, personal computer, peralatan PC, dan lainnya.	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	0	0	5
1.1.3.3.3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				
	a. menyediakan bahan logistik kantor	jumlah paket alat tulis kantor dan natura yang disediakan	4	5	5	5
1.1.3.3.4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
	a. Menyediakan barang cetakan dan penggandaan berupa Karangan Bunga, Parcel , Materai, buku cek bank Jatim dan Fotocopy	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	10	10
1.1.3.3.5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	a. Melaksanakan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD baik di dalam kota (termasuk pulau Bawean) atau perjalanan dinas biasa	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terselenggara	6	6	7	7
1.1.3.4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Jasa Operasional yang tersedia				
1.1.3.4.1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
	a. menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.1.3.4.2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
	a. Menyusun laporan realisasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor antara lain : Honorarium Narsum dan senam, Gaji PPPK PW , Jasa Tenga Kebersihan, Jasa Keamanan, Jasa Tenaga alih daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12
1.1.3.5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia				
1.1.3.5.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
	a. melakukan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1
1.1.3.5.2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
	a. melakukan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	11	10	10
1.1.3.5.3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
	a. Melaksanakan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi ringan, sedang, berat untuk gedung kantor dinas, gedung UPT, rumah aman, dan balai penyuluhan KB tiap kecamatan	Jumlah unit gedung bangunan yang ditangani pemeliharaan dan/atau rehabilitasinya	0	0	3	0
1.1.3.5.4	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
	a. Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Berkala Sarana Prasarana Gedung Kantor seperti Komputer, Alat Pendingin, dan Printer	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapatkan tindakan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi secara berkala	5	5	5	5
1.2	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun				
1.2.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun / Age Specific Fertility Rate (ASFR)				
1.2.1.1	PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi TPK dan akses internet mobile				

No.	Uraian		Indikator	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.2.1.1.1	PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					
	a. Melakukan Pendataan dan Pendampingan Keluarga Resiko Stunting	Laporan Pendataan dan Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di 18 Kecamatan		36	54	54	36
1.2.1.1.2	PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan					
	a. melakukan pendampingan pada Remaja Calon Pengantin	Jumlah Laporan Pendampingan Remaja Calon Pengantin		36	54	54	36
1.2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Remaja yang Mengakses Kegiatan Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesehatan Reproduksi, atau Perlindungan Anak					
1.2.2.1	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis					
1.2.2.1.1	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan					
	a. Menyediakan Biaya Operasional untuk kader IMP dan Sub IMP	Jumlah Laporan Kader IMP dan Sub IMP di 18 Kecamatan		54	54	54	54
1.2.2.1.2	PEMBENTUKAN KELOMPOK KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BINA KELUARGA BALITA (BKB), BINA KELUARGA REMAJA (BKR), PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) BINA KELUARGA LANSIA (BKL), USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk					
	a. Melaksanakan Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk		0	1	1	0
1.2.3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak					
1.2.3.1	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/Perusahaan / Lembaga Masyarakat					

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.2.3.1.1	BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
	a. Melaksanakan pendampingan standardisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) pada satuan pendidikan sebagai upaya penguatan pemenuhan indikator KLA pada klaster kelembagaan dan layanan ramah anak	Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pendampingan standardisasi Sekolah Ramah Anak (SRA)	0	4	0	0
	b. Menyusun SOP dan mekanisme Satgas Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak sebagai penguatan tata kelola kelembagaan perlindungan anak dalam mendukung tindak lanjut indikator KLA	Jumlah dokumen SOP dan mekanisme Satgas Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak yang tersusun	0	0	0	1
	c. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi pemenuhan hak anak kepada dunia usaha sebagai bentuk penguatan peran multipihak dalam mendukung pelaksanaan indikator KLA	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi pemenuhan hak anak kepada dunia usaha yang terlaksana	1	0	0	0
1.2.3.1.2	PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
	a. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Khusus Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan yang ramah anak	Jumlah dokumen hasil kegiatan MUSRENBANG Khusus Anak	1	0	0	0
	b. Memfasilitasi Partisipasi Forum Anak dalam kegiatan Tingkat Nasional	Jumlah perwakilan Forum Anak yang mengikuti kegiatan Tingkat Nasional	0	1	0	0
	c. Penyelenggaraan Lomba Karya Informasi dan Edukasi dari Anak Untuk Anak sebagai Sarana Pengembangan Kreativitas, Partisipasi, dan Pemahaman Anak terhadap Pemenuhan Hak Anak	Jumlah karya anak terbaik yang dihasilkan dalam Lomba Karya Informasi dan Edukasi	0	6	0	0
	d. Melaksanakan Sosialisasi Pembuatan Website Mini sebagai media informasi dan edukasi terkait hak anak dan kegiatan Forum Anak	Jumlah Website yang telah dibuat	0	1	0	0
	e. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Pemenuhan, Perlindungan dan Partisipasi Anak	Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Pemenuhan, Perlindungan dan Partisipasi Anak	0	0	1	0
	f. Penyusunan Booklet / Handout Forum Anak sebagai Media Informasi dan Edukasi mengenai peran, fungsi dan kegiatan Forum Anak	Jumlah dokumen Booklet/Handout Forum Anak	0	0	1	0
	g. Melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan, Manajemen, dan Organisasi Forum Anak sebagai Upaya Meningkatkan Kapasitas, Keterampilan, dan Peran Partisipasi Anak	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan, Manajemen, dan Organisasi Forum Anak	0	0	0	1
	h. Publikasi Media Forum Anak (Iklan Media Sosial) sebagai sarana Penyebarluasan Informasi dan Peningkatan Partisipasi Anak	Jumlah Media yang mempublikasi	1	1	1	1

No.	Uraian		Indikator	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
	i.	Mencetak Booklet Forum Anak	Jumlah Booklet yang dicetak	0	0	1	0
	j.	Fasilitasi Rapat Rutin Forum Anak sebagai Sarana Koordinasi, Komunikasi dan Evaluasi Kegiatan Forum Anak	Jumlah Kegiatan Rapat Rutin Forum Anak yang telah diselenggarakan	2	3	3	2
1.2.3.1.3	MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
	a.	Melaksanakan rapat koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagai tahap awal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemenuhan layak anak yang telah terealisasi	Jumlah Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/Perusahaan/Lembaga masyarakat	16	24	24	24
	b.	Melaksanakan Desk Evaluasi KLA sebagai upaya untuk memonitoring pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada aplikasi evaluasi KLA	Jumlah Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/Perusahaan/Lembaga masyarakat	16	24	24	24
	c.	Melaksanakan Rapat Evaluasi KLA untuk mengetahui kekurangan serta aspek yang dapat dioptimalkan pada pelaksanaan pemenuhan hak anak yang akan datang	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	0	0	1	0
1.2.3.2	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah Diselenggarakan				
1.2.3.2.1	PENDAMPINGAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				
	a.	Melaksanakan pendampingan pengasuhan anak pada Tempat Penitipan Anak (TPA) yang bersifat gratis dan مخصوص untuk para wanita pekerja rentan di Kabupaten Gresik. Memberikan layanan yang ramah dan layak anak sehingga anak nyaman dan orang tua tenang dalam bekerja	Jumlah anak-anak yang mendapatkan layanan pendampingan dan pengasuhan di TPA yang dilakukan secara teratur setiap hari. Menyiapkan anak-anak menjadi lebih mandiri dan siap untuk bersekolah di pendidikan formal	10	10	10	10
2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian penduduk, keluarga berkualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta layanan publik yang inklusif.		Indeks Perlindungan Anak				
2.1	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak		Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin				
2.1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Keluarga Desil 1 DTSEN yang mengakses layanan bimbingan konseling, kesehatan reproduksi dan/ atau perlindungan anak				
2.1.1.1	PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi TPK dan akses internet mobile				

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
2.1.1.1.1	PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				
	a. melakukan Pendataan dan pendampingan pada Remaja Calon Pengantin	jumlah laporan Pendataan dan pendampingan pada Remaja Calon Pengantin	36	54	54	36
2.1.1.1.2	PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				
	a. melakukan pendampingan dan layanan rujukan bagi Remaja Calon Pengantin	Jumlah Laporan dan layanan rujukan bagi Remaja Calon Pengantin	36	54	54	36
2.1.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Berhasil diselesaikan				
2.1.2.1	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan				
2.1.2.1.1	LAYANAN PENGADUAN ATAU PENJANGKAUAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melakukan pendampingan asesmen awal bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan layanan pendampingan selama proses dispensasi nikah	20	20	20	20
2.1.2.1.2	LAYANAN PENDAMPINGAN TENAGA AHLI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melaksanakan layanan pendampingan hukum bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan layanan pendampingan hukum	3	3	3	3
2.1.2.1.3	LAYANAN MEDIKOLEGAL BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melaksanakan layanan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin yang memerlukan pemeriksaan kesehatan lanjutan	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan lanjutan	1	1	1	1
2.1.2.1.4	LAYANAN GELAR KASUS BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait penurunan kasus perkawinan usia anak	Jumlah gelar kasus yang dilaksanakan	0	1	0	1
2.1.2.1.5	LAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				

No.	Uraian		Indikator	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
		a. Melakukan pendampingan layanan rumah perlindungan bagi anak yang membutuhkan fasilitasi rumah perlindungan khususnya terkait pemaksaan perkawinan	Jumlah anak terkait pemaksaan perkawinan anak yang mendapatkan layanan pendampingan di rumah perlindungan	0	1	1	1
2.1.2.1.6	LAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				
		a. Melaksanakan pendampingan terhadap calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin	Jumlah calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin yang mendapatkan layanan pendampingan	4	4	4	4
2.1.2.1.7	LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN BPJS, JAMKESDA, DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA		Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		a. Melakukan pendampingan layanan pemeriksaan psikologis bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin	Jumlah calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin yang mendapatkan layanan pemeriksaan psikologis	20	20	20	20
2.1.2.1.8	LAYANAN SPESIFIK UNTUK PEMULIHAN KORBAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				
		a. Melakukan asesmen dan identifikasi kebutuhan spesifik bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan	0	2	2	2
2.1.2.2	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak				
2.1.2.2.1	ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KTA KEPADA PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota				
		a. Melaksanakan roadshow bersama forum anak sebagai upaya bentuk partisipasi forum anak	Jumlah kegiatan roadshow bersama forum anak yang dilaksanakan	1	3	0	0
		b. Melaksanakan advokasi dan inisiasi pelayanan ramah anak	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan advokasi dan inisiasi Ramah Anak	0	0	0	32
		c. Melaksanakan advokasi dan inisiasi rumah ibadah ramah anak	Jumlah Masjid yang mendapatkan advokasi dan inisiasi Ramah Anak	0	0	10	20
		d. Melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak meliputi pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kekerasan terhadap AMPK	Jumlah lembaga/instansi yang mendapatkan advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak	0	0	20	10
2.2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan				
2.2.1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Rasio Anak Pekerja Migran Pasca Pemulangan yang Mendapatkan Akses Layanan Psikososial				

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
2.2.1.1	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan				
2.2.1.1.1	LAYANAN PENGADUAN ATAU PENJANGKAUAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melakukan layanan penjangkauan untuk melakukan asesmen awal kepada anak pekerja migran pasca pemulangan	Jumlah anak pekerja migran yang mendapatkan layanan pendampingan penjangkauan pasca pemulangan	4	6	6	6
2.2.1.2	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas				
2.2.1.2.1	PENGEMBANGAN KIE (KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI) PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				
	a. Melaksanakan pengintegrasian muatan lokal Sekolah Ramah Anak sebagai media KIE perlindungan khusus anak untuk memperkuat edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan	Jumlah dokumen/muatan KIE perlindungan khusus anak yang terintegrasi dalam muatan lokal Sekolah Ramah Anak	0	0	1	1
	b. Menyusun pedoman dan buku saku Musrenbang Anak sebagai media KIE untuk memperkuat partisipasi anak dan penyebaran informasi perlindungan khusus anak dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen pedoman dan buku saku Musrenbang Anak yang tersusun	1	1	0	0
	c. Menyusun pedoman dan buku saku Satuan Pendidikan Ramah Anak (SPRA) sebagai media KIE perlindungan khusus anak untuk memperkuat kapasitas satuan pendidikan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak	Jumlah dokumen pedoman dan buku saku Satuan Pendidikan Ramah Anak (SPRA) yang tersusun	1	1	0	0
2.2.1.2.2	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				
	a. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM layanan dalam asesmen dan manajemen kasus anak pekerja migran pasca pemulangan	Jumlah SDM layanan yang mendapatkan pelatihan peningkatan SDM dalam penanganan pendampingan kepada anak pekerja migran pasca pemulangan	0	0	20	0
2.3	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif				
2.3.1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Berhasil diselesaikan				
2.3.1.1	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan				

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
2.3.1.1.1	LAYANAN PENGADUAN ATAU PENJANGKAUAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melaksanakan penerimaan pengaduan kasus anak dalam situasi khusus	Jumlah kasus anak yang mendapatkan layanan komprehensif	40	40	40	40
2.3.1.1.2	LAYANAN PENDAMPINGAN TENAGA AHLI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melakukan layanan pendampingan hukum bagi anak dalam situasi khusus	Jumlah anak dalam situasi khusus yang mendapatkan layanan pendampingan hukum	3	3	3	3
2.3.1.1.3	LAYANAN MEDIKOLEGAL BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melakukan pendampingan layanan pemeriksaan kesehatan bagi anak dalam situasi khusus	Jumlah anak dalam situasi khusus yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan	3	3	3	3
2.3.1.1.4	LAYANAN GELAR KASUS BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melaksanakan layanan gelar kasus antar lintas sektor dalam penanganan kasus anak dalam situasi khusus	Jumlah anak dalam situasi khusus yang mendapatkan layanan gelar kasus/ Jumlah kasus anak dalam situasi khusus yang ditangani melalui gelar kasus lintas sektor	0	2	2	2
2.3.1.1.5	LAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melakukan pendampingan bagi anak dalam situasi khusus yang membutuhkan rumah perlindungan	Jumlah anak dalam situasi khusus yang mendapatkan fasilitasi rumah perlindungan	3	3	3	3
2.3.1.1.6	LAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melakukan pendampingan pada anak dalam situasi khusus yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah anak dalam situasi khusus yang mendapatkan pendampingan	40	40	40	40
2.3.1.1.7	LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN BPJS, JAMKESDA, DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	a. Melakukan pendampingan layanan pemeriksaan psikologis dan pemeriksaan kesehatan pada kasus anak dalam situasi khusus	Jumlah anak dalam situasi khusus yang mendapatkan layanan pemeriksaan psikologis dan pemeriksaan kesehatan	25	25	25	25
2.3.1.1.8	LAYANAN SPESIFIK UNTUK PEMULIHAN KORBAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	a. Melakukan pendampingan pada anak dalam situasi khusus yang memerlukan kebutuhan spesifik	Jumlah anak dalam situasi khusus yang mendapatkan layanan kebutuhan spesifik	3	3	2	2
2.3.1.2	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak				
2.3.1.2.1	ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KTA KEPADA PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota				
	a. Melaksanakan Pertemuan Lintas Sektor untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah pertemuan koordinasi lintas sektor terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang terlaksana	2	6	0	0
2.4	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga				
2.4.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun / Age Specific Fertility Rate (ASFR)				
2.4.1.1	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis				
2.4.1.1.1	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				
	a. melakukan pendampingan dan kunjungan bagi keluarga calon akseptor KB	Jumlah Laporan pendampingan dan kunjungan bagi keluarga calon akseptor KB	18	18	18	18
2.4.2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar				
2.4.2.1	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kecamatan Yang Sudah Memiliki Konsultasi dan Pengaduan keluarga				
2.4.2.1.1	LAYANAN KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN PA LINGKUP KABUPATEN/KOTA	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota				
	a. Melaksanakan konseling dan konsultasi keluarga lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/keluarga yang mendapatkan layanan konseling dan konsultasi	27	27	27	26
2.4.2.1.2	LAYANAN PENERIMAAN PENGADUAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN PA LINGKUP KABUPATEN/KOTA	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota				

No.	Uraian		Indikator	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
	a.	Melaksanakan peningkatan layanan melalui pelatihan bagi pendamping layanan rumah curhat	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rumah curhat	0	32	0	0
3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian penduduk, keluarga berkualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta layanan publik yang inklusif.		Indeks Pemberdayaan Gender				
3.1	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan		Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan				
3.1.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan yang Responsif Gender				
3.1.1.1	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		Jumlah OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya				
3.1.1.1.1	ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				
	a.	Melaksanakan Pendampingan Penyelenggaraan PUG melalui Musrenbang Perempuan serta Koordinasi Kelembagaan di Daerah	Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan penyelenggaraan PUG melalui Musrenbang Perempuan dan Koordinasi Kelembagaan di Daerah	0	0	46	0
3.1.1.1.2	PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan				
	a.	Melaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Lembaga	Jumlah OPD yang mengikuti Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	0	0	0	46
3.1.1.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDes				
3.1.1.2.1	ADVOKASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi				
	a.	Melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan melalui pembelajaran sekolah perempuan serta workshop dan evaluasi sekolah perempuan	Jumlah desa yang mendapatkan pembelajaran sekolah perempuan serta workshop dan evaluasi sekolah perempuan	0	11	6	17
3.1.1.2.2	SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				
	a.	Melaksanakan kegiatan puspa pinatih bidang perlindungan anak dan bidang Pemberdayaan Perempuan meliputi Sosialisasi, Peringatan Hari Kartini dan Hari Anak	Jumlah perempuan yang mengikuti kegiatan puspa bidang perlindungan anak dan bidang Pemberdayaan Perempuan meliputi Sosialisasi, Peringatan Hari Kartini dan Hari Anak	35	115	126	35

No.	Uraian		Indikator	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
3.1.1.2.3	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, ATAU HUKUM, ATAU SOSIAL, DAN ATAU EKONOMI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				
	a. Melaksanakan pembelajaran dan pelatihan serta pendampingan kepada Perempuan Penerima Manfaat (PPM)		Jumlah PPM yang mengikuti pembelajaran dan pelatihan serta pendampingan Bunda Puspa	0	160	160	160
3.1.1.3	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi				
3.1.1.3.1	PENDAMPINGAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				
	a. Melaksanakan pendampingan pada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yaitu GOW dan DWP		Jumlah Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	2	2	2	2
3.2	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender				
3.2.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan yang Responsif Gender				
3.2.1.1	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		Jumlah OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya				
3.2.1.1.1	ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				
	a. Melaksanakan Desk ARG dan Pendampingan Penyusunan PPRG		Jumlah OPD yang mendapatkan Desk ARG dan Pendampingan Penyusunan PPRG	0	0	46	0
3.2.1.1.2	PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan				
	a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi perangkat daerah		Jumlah OPD yang mendapatkan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi perangkat daerah	0	0	0	46
4	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian penduduk, keluarga berkualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta layanan publik yang inklusif.		Indeks Ketimpangan Gender				
4.1	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi		Unmet need ber-KB				
4.1.1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)				

No.	Uraian		Indikator	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
4.1.1.1	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah akseptor MKJP yang dilayani				
4.1.1.1.1	PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
	a. Melaksanakan pelayanan KB MKJP		Jumlah Akseptor KB MKJP Yang dilayani	626	846	483	356
4.1.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase Unit Pemberi Layanan yang telah Tersosialisasi Program Bangsa Kencana				
4.1.2.1	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah Dokumen Data				
4.1.2.1.1	PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				
	a. Melakukan Fasilitasi Laporan Pelayanan KB dan mutasi Alat dan Obat Kontrasepsi oleh Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) diinput di Aplikasi SIGA		Jumlah Laporan Pelayanan dan Mutasi Alat dan Obat Kontrasepsi	3	3	3	3
5	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian penduduk, keluarga berkualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta layanan publik yang inklusif.		Indeks Inklusi (GEDSI)				
5.1	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin				
5.1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Keluarga Desil 1 DTSEN yang mengakses layanan bimbingan konseling, kesehatan reproduksi dan/ atau perlindungan anak				
5.1.1.1	PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi TPK dan akses internet mobile				
5.1.1.1.1	PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				
	a. melakukan pendataan dan pendampingan Remaja Calon Pengantin		jumlah laporan pendataan dan pendampingan Remaja Calon Pengantin	36	54	54	36
5.1.1.1.2	PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				
	a. Melakukan Pendampingan Keluarga Resiko Stunting		Jumlah Laporan Keluarga Resiko Stunting di 18 Kecamatan	36	54	54	36

No.	Uraian		Indikator	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
5.2	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif				
5.2.1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO Yang Berhasil Diselesaikan				
5.2.1.1	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil diselesaikan				
5.2.1.1.1	LAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melakukan pendampingan pada perempuan korban kekerasan yang memerlukan layanan rumah perlindungan		Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan	3	3	3	3
5.2.1.1.2	&LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN BPJS, JAMKESDA, DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA&		Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melakukan pendampingan pada perempuan korban kekerasan yang memerlukan layanan pemeriksaan psikologis		Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemeriksaan psikologis dan layanan kesehatan	25	25	25	25
5.2.1.1.3	LAYANAN GELAR KASUS BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melaksanakan layanan gelar kasus antar lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan		Jumlah kasus perempuan yang ditangani melalui gelar kasus lintas sektor	6	6	6	6
5.2.1.1.4	LAYANAN PENDAMPINGAN TENAGA AHLI BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA		Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melakukan layanan pendampingan hukum bagi perempuan korban kekerasan		Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan hukum	6	6	6	6
5.2.1.1.5	LAYANAN MEDIKOLEGAL BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan pemeriksaan kesehatan		Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan	13	13	12	12
5.2.1.1.6	LAYANAN PENGADUAN ATAU PENJANGKAUAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melakukan penjangkauan pada kasus perempuan korban kekerasan		Jumlah korban perempuan yang mendapatkan layanan penjangkauan	38	38	37	37

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.2.1.1.7	LAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				
	a. Melakukan layanan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan	25	25	25	25
5.2.1.2	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan				
5.2.1.2.1	KERJASAMA PARA PIHAK DALAM PENCEGAHAN KTP KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				
	a. Menyusun Dokumen Regulasi dan Kebijakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk memperkuat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	0	0	1	1
5.2.1.2.2	ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KTP DAN TPPO KEPADA PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				
	a. Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan regulasi dan kebijakan TPPO sebagai langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana perdagangan orang melalui regulasi dan kebijakan yang diterapkan.	jumlah dokumen yang memuat regulasi serta kebijakan pencegahan TPPO di lingkungan Kabupaten/Kota	0	1	1	1
	b. Menyosialisasikan regulasi dan kebijakan TPPO yang telah ditetapkan kepada masyarakat sebagai bentuk penjaminan keamanan serta meningkatkan kesadaran terhadap ancaman TPPO	Jumlah OPD/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha yang tersosialisasikan terkait kebijakan dan regulasi TPPO	0	15	15	30
	c. Membuat Film Pendek terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagai bentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat melalui media yang ringan dan mudah dimengerti oleh masyarakat	Jumlah konten komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat dilihat oleh masyarakat	0	0	1	1
	d. membentuk FORSAGA (Forum Mahasiswa Anti Kekerasan Berbasis Gender) sebagai pelopor anti kekerasan dan peduli terhadap kesetaraan gender untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman pada tingkatan perguruan tinggi	jumlah FORSAGA (Forum Mahasiswa Anti Kekerasan Berbasis Gender) pada lembaga/satuan pendidikan	0	1	2	3
5.2.1.3	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi				
5.2.1.3.1	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				
	a. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM layanan dalam asesmen dan manajemen kasus perempuan korban kekerasan	Jumlah SDM lembaga penyedia yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	0	23	0	0

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
6	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian penduduk, keluarga berkualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta layanan publik yang inklusif.	Indeks Kemiskinan Multidimensi				
6.1	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan				
6.1.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan yang Responsif Gender				
6.1.1.1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDes				
6.1.1.1.1	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, ATAU HUKUM, ATAU SOSIAL, DAN ATAU EKONOMI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				
	a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pendampingan kepada PPM Bunda Puspa	Jumlah PPM yang mengikuti pembelajaran dan pelatihan serta pendampingan Bunda Puspa	0	160	160	160

Gresik, 2026
 KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK



dr. TITIK ERNAWATI, M.H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19760903 200701 2 010